

## **BAB III**

### **DINAMIKA KONFLIK DI DARFUR**

Pada BAB III ini memiliki pembahasan terkait sejarah dari Sudan. Dalam bab ini penulis memaparkan bagaimana Kota Darfur secara garis besar serta menjelaskan bagaimana kondisi geografis, perekonomian, wilayah serta etnis di Darfur dan juga menjelaskan tentang bagaimana konflik di Darfur bisa terjadi, siapa saja pihak yang terlibat dalam konflik Darfur dan dampak dari konflik Darfur.

#### **A. Sejarah Sudan**

Negara “Sudan” merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu “*Bilad As Sudan*”. Kata tersebut diberikan oleh orang-orang muslim yang ada pada abad pertengahan. Negara yang memiliki nama Republik Sudan ini wilayahnya cukup besar hampir 1 juta mil persegi. Jika ditinjau dari segi geografisnya, Sudan merupakan salah satu negara terluas dan juga yang menjadi negara tunggal terbesar di Afrika yang luas negaranya sekitar 2,5 juta km<sup>2</sup>. Negara Sudan ini terletak di Afrika bagian Utara yang beribu kota Khartoum.

Di sebelah utara Sudan berbatasan langsung dengan Mesir, lalu di sebelah timur berbatasan langsung dengan Eritrea dan juga Ethiopia. Sedangkan di sebelah tenggara berbatasan langsung dengan Kenya dan Uganda, di sebelah barat daya berbatasan langsung dengan Republik Afrika Tengah dan juga Kongo, di sebelah barat berbatasan langsung dengan Chad, dan yang terakhir yaitu di sebelah barat laut berbatasan langsung dengan Libya. Batasan-batasan yang dimiliki oleh Sudan ini dibuat tidak berdasarkan perbatasan alamiah, tetapi guna untuk memenuhi kepentingan para penjajah.

Populasi penduduk di Sudan sangatlah berbeda dengan populasi penduduk yang ada di negara-negara lain yang juga berada di benua Afrika. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari adanya dua kebudayaan yang sangat dominan di Sudan, dua kebudayaan tersebut yaitu kebudayaan Afrika dan juga kebudayaan Arab. Selain tentang kebudayaannya, populasi penduduk di Sudan juga berasal dari dua etnis yang cukup dominan seperti etnis Afrika yang berada di Sudan sebesar 60% dan etnis Arab sebesar 40%. Penduduk Sudan yang bermukim di bagian utara Afrika atau lebih tepatnya yang bermukim di Mesir merupakan penduduk yang berasal dari ras kulit hitam yang familiar dengan sebutan masyarakat Nubia.

Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Nubia ini, ada sekitar 70% penduduknya yang beragama Islam. Sedangkan sebanyak 5% penduduk yang bermukim di Sudan Selatan memeluk agama Kristen dimana agama ini mulai masuk ke Sudan pada abad ke-6 yang mana selanjutnya pada abad ke-18 sampai abad ke-19 agama Kristen ini terus berkembang. Sementara itu penduduk lainnya yang masih memegang kepercayaan tradisional ada di angka 25%. Selain etnis dan agama, Sudan juga memiliki bermacam-macam bahasa. Namun bahasa yang mendominasi di Sudan adalah bahasa Arab tetapi penduduk Sudan juga masih ada yang menggunakan bahasa suku asli darimana mereka berasal seperti bahasa Ta Bedawie, Nuban, Nubian, Nilotic, Fur, Nilo-Hamitic, dan Beja. (David, 2007).

Telah diketahui bahwasanya pada awal abad sebelum masehi, Sudan telah memainkan perannya di dalam sejarah dunia. Seperti contohnya adalah kerajaan Kush, dimana kerajaan ini memiliki sebuah prasasti Mesir, karya-karya dari penulis Romawi dan juga Yunani serta Alkitab. Pada saat itu sekiranya tahun 1820 sampai tahun 1821 Sudan juga sudah memiliki beberapa kerajaan kecil yang telah merdeka, dimana pada waktu itu bertepatan dengan penjajahan yang dilakukan oleh Mesir dengan tujuan ingin menyatukan wilayah Sudan

Utara dan di Sudan Utara inilah kerajaan Kush berdiri yang memiliki ibu kota bernama Napatan.

Selain prasasti dan juga karya-karya dari penulis Romawi dan juga Yunani, kerajaan Kush ini juga dikenal memiliki sistem pertanian yang bagus. Dimana sistem pertaniannya ditopang oleh aliran sungai yang nantinya menuju ke selatan dan juga ke utara. Mesir cukup lama telah menguasai Kerajaan Kush ini yaitu berkisar pada tahun 657 SM hingga 736 SM, dan kemudian pada tahun 150 SM kekaisaran Axumite yang berasal dari Ethiopia masuk dan berhasil meruntuhkan kerajaan Kush.

Setelah kerajaan Kush runtuh, maka munculnya dua kerajaan baru sebagai pengganti yaitu yang pertama adalah kerajaan Maqurra yang berada di Sudan Utara dengan ibukotanya Dongola tua dan yang kedua adalah kerajaan Alwa yang berada di Sudan Tengah dengan ibukotanya Soba. Namun pada akhirnya kedua kerajaan tersebut juga runtuh dikarenakan adanya persekutuan yang terjadi antara etnis Arab dan juga Mesir. Pada abad ke-15 kerajaan Maqurra runtuh dan selanjutnya pada abad ke-17 kerajaan Alwa juga runtuh. Pada saat kerajaan Alwa runtuh, Sudan Selatan juga sedang mengalami perpecahan suku yang mana hal tersebut menjadikan Sudan Selatan sebagai sasaran bagi para budak perompak hingga abad ke-20.

Berkisar pada akhir abad ke-18 setelah Turki, Inggris mulai muncul dan menjadi penguasa baru di Mesir dan juga Sudan. Para pejuang dari Sudan yang pada saat itu berada dibawah pimpinan Ahmed Al-Mahdi melakukan perlawanan terhadap Mesir dan juga Inggris guna untuk mendapatkan kemerdekaannya. Perjuangan dari para pejuang tersebut membuahkan hasil dimana pada tahun 1885 mereka berhasil membuat para penjajah angkat kaki dari Sudan. Namun, tidak lama berselang kemerdekaan negara Sudan berhasil direbut kembali oleh Mesir dan juga Inggris yaitu lebih tepatnya pada tahun 1899. Melihat hal tersebut, rakyat Sudan tidak tinggal

diam. Mereka terus melakukan perlawanan demi merebut kembali kemerdekaan mereka yang telah di rampas.

Sehingga pada akhirnya, di tahun 1953 Inggris dan juga Mesir mengadakan sebuah perjanjian mengenai penyelenggaraan pemilu guna untuk menentukan dan juga memilih partai politik yang nantinya akan menjadi cikal bakal negara Sudan. Selanjutnya setahun setelah perjanjian itu dibuat tepatnya pada tahun 1954 terselenggara lah pemilu untuk yang pertama kali nya di Sudan. Dalam pemilu ini partai yang berhasil mendapatkan suara terbanyak yaitu *National Unionist Party* (NUP) yang dipimpin oleh Ismail Al Azhari. Kemudian pada 1 Januari 1956 Ismail Al Azhari di sah kan menjadi presiden Sudan yang pertama. Harapannya dengan adanya konstitusi ini akan dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi pada pemimpin di daerah Sudan Selatan yaitu mengenai sekularisasi negara dan juga negara kesatuan ataupun federal. Namun pada kenyataannya konstitusi ini tidak berhasil menyelesaikan permasalahan yang ada.

Pada akhirnya setelah menerima kemerdekaan yang diberikan oleh Inggris, Sudan mulai merasakan adanya perubahan dalam segi pemerintahannya. Perubahan tersebut berupa adanya pergantian pemerintahan baik itu yang dipilih melalui pemilihan umum atau pelengseran pemerintahan yang dilakukan oleh militer dengan cara kudeta. Sudan memulai pemerintahannya dengan bentuk pemerintahan sipil yang berada langsung dibawah pimpinan seorang presiden dan saat itu presiden yang menduduki kursi pemerintahan sebagai pemimpin Sudan adalah Ismail Al Azhari. Namun kursi kepemimpinan yang sedang di duduki oleh Ismail Al Azhari harus dilengserkan karena munculnya banyak pertentangan yang terjadi antar kelompok dan mengakibatkan Jenderal Ibrahim Abboud melakukan sebuah kudeta yang pada akhirnya menjadikannya sebagai presiden kedua Sudan.

Pada tahun 1964 Jendral Ibrahim Abboud memutuskan untuk memberikan kekuasaannya kepada

pemerintahan transisi yang pada saat itu dipimpin oleh Al Khatim Al Khalifa. Tidak berselang lama dari masa kepemimpinannya, tepatnya pada tahun 1966 Al Khatim Al Khalifa menyerahkan semua kekuasaannya kepada pemenang pemilu kedua saat itu. Ada dua partai yang berhasil memperoleh suara terbanyak dan muncul sebagai pemenang yaitu *National Unionist Party* (NUP) dan juga Umma Party yang mana masing-masing dipimpin Ahmad Mighfani yang bertindak sebagai Presiden dan Sadiq Al Mahdi yang bertindak sebagai Perdana Menteri.

Pemerintahan parlementer yang ada di Sudan tidak berlangsung lama dikarenakan pada tahun 1969 kembali terjadi sebuah kudeta yang dilakukan oleh Jendral Ja'far Numeiri yang akhirnya menjadikannya sebagai pemegang kekuasaan di Sudan hingga tahun 1985. Selama masa kepemimpinannya, Jendral Ja'far Numeiri sudah memberlakukan hukum islam dan ternyata hal tersebut menuai banyak pertentangan di kalangan masyarakat Sudan Selatan yang mana mayoritas dari mereka memeluk Animisme (kepercayaan tradisional) dan agama Kristen. Tidak berselang lama dari itu Jendral Ja'far Numeiri lengser karena mendapatkan kudeta dari Jendral Al Dahab dan akhirnya kepemimpinan jatuh ke tangan Jendral Al Dahab selama satu tahun.

Setelah satu tahun berlangsung, Jendral Al Dahab juga menyerahkan seluruh kekuasaannya kepada pemenang pemilu ketiga yang diadakan di Sudan. Pemenang dari pemilu ketiga ini adalah Umma Party dan juga *Democratic Unionist Party*. Sejak saat pemilu pertama hingga ketiga ini terhitung sebanyak dua kali Sudan menganut sistem pemerintahan Parlementer yakni pada tahun 1986 hingga 1989. Pemerintahan koalisi yang ada di Sudan dirasa tidak dapat menyelesaikan konflik yang sedang terjadi terutama dalam bidang politik dan juga pemberontakan yang berasal dari masyarakat Sudan Selatan yang mana pada saat itu dipimpin oleh Jhon Garang Ed Mabior.

Konflik yang terjadi di Sudan ini hampir menghancurkan Sudan dan akhirnya mendorong Brigjen Omar Hassan Ahmed Al Bashir untuk melakukan kudeta tak berdarah pada tanggal 30 Juni 1989 yang mendapatkan dukungan penuh dari para perwira muda serta *National Islamic Front* (NIF) yang berada dibawah pimpinan DR. Hassan Abdalla Turabi. Dikarenakan adanya kudeta tersebut yang akhirnya menjadikan Omar Hassan Ahmed Al Bashir mengalami puncak kejayaan hingga saat ini. (Charles, 1989).

Sebelum pada masa pemerintahan presiden Omar Hassan Al Bashir dan menyandang predikat sebagai negara yang baru saja merdeka, kondisi ekonomi dan juga politik di Sudan masih bisa dibilang sangat mengkhawatirkan, dimana pada saat itu di dunia internasional Sudan dikenal sebagai negara yang miskin dan sangat terbelakang. Selain kondisi ekonominya yang dikenal masih sangat buruk, keadaan politik Sudan juga belum bisa dikatakan baik karena masih sering terjadi kudeta yang dilakukan oleh militer Sudan yang ditujukan kepada para pemimpin Sudan.

Situasi politik di Sudan ketika pada masa kepemimpinan Presiden Omar Hassan Al Bashir juga mengalami sedikit permasalahan dimana terjadi perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Thurabi kepada Omar Hassan Al Bashir. Thurabi merupakan Ketua dari Parlemen Nasional Sudan. Thurabi melakukan pengajuan rancangan amandemen terhadap konstitusi baru yang telah dibuat oleh presiden Bashir atau biasa disebut dengan konstitusi 1998. Konstitusi 1998 berisikan tentang upaya untuk menghidupkan kembali Perdana Menteri dan juga adanya ketentuan tentang kedudukan wali yang ada di dalam pasal 56, 57 dan 60.

Pengajuan amandemen yang dilakukan oleh Thurabi ini langsung ditanggapi oleh Al Bashir dengan pengeluaran dekrit presiden pada tanggal 12 Desember 1999 yang mana dekrit presiden tersebut berisikan tentang pembubaran Parlemen Nasional dan juga pemberlakuan keadaan darurat di

Sudan dengan kurun waktu selama 3 bulan untuk menanggukhan pasal 56, 57, dan 60 mengenai kedudukan para wali.

Konflik-konflik seperti itu masih terus berlangsung di Sudan yang akhirnya mengakibatkan presiden Omar Hassan Al Bashir melakukan pembubaran terhadap partai-partai politik yang ada di Sudan dan melakukan pembentukan partai baru yang bernama Partai Kongres Nasional (PKN). Partai ini dibuat dengan tujuan agar dapat menjadi tempat ataupun wadah untuk menampung aspirasi-aspirasi masyarakat Sudan dan akhirnya partai tersebutlah yang berkuasa di Sudan pada saat itu. Selain itu, presiden Omar Hassan Al Bashir juga mempunyai komponen lain yang disebut sebagai Dewan Komando Rakyat (DKR) yang mana kekuasaan pemerintahannya dipimpin langsung oleh Presiden Omar Hassan Al Bashir.

Dewan Komando Rakyat atau DKR ini mempunyai kewenangan untuk melakukan pengeluaran keputusan legislatif dan juga eksekutif, menetapkan perubahan, dan juga mengangkat serta memberhentikan para pejabat negara. Namun Dewan Komando Rakyat (DKR) ini kemudian dibubarkan lalu diganti dengan parlemen sementara. Dalam pemilihan umum presiden dan juga parlemen pada tahun 1996 yang diselenggarakan di Sudan, Partai Kongres Nasional memperoleh suara terbanyak dan meraih kemenangan sehingga hal tersebutlah yang menjadikan Presiden Omar Hassan Al Bashir menjadi presiden untuk pertama kalinya dengan periode masa jabatan selama lima tahun (1996-2001).

Presiden Omar Hassan Al Bashir membentuk konstitusi baru pada Mei 1998. Konstitusi baru ini mendapat dukungan penuh dari rakyat melalui sebuah referendum. Konstitusi ini terdiri dari 9 BAB dan juga 140 Pasal, yang mana akan mulai diberlakukan pada tanggal 30 Juni 1998. Dalam Bab 1 pasal 2 konstitusi baru 1998 telah disebutkan bahwasanya Republik Sudan adalah Negara Federal yang

menganut sistem pemerintahan presidensial. Sumber hukum yang berlaku adalah Hukum Islam (Syariah), konstitusi dan juga konsensus nasional.

Berdasarkan konstitusi tersebut dibentuklah juga Mahkamah konstitusi dimana ketua dan juga anggotanya dipilih langsung oleh Presiden melalui persetujuan dari parlemen. Selanjutnya pada tahun 2000 pemerintah Sudan mengadakan pemilihan umum kembali yang diikuti oleh Partai Serikat Buruh, Partai Kongres Nasional dan juga PPP. Dalam pemilu kali ini, tidak ada satu pun partai oposisi yang turut serta dikarenakan partai oposisi melakukan aksi pemboikotan terhadap pemilu. Hasil dari pemilihan umum ini kembali dimenangkan oleh Partai Kongres Nasional yang mana hal tersebut membuat Omar Hassan Al Bashir kembali menjadi Presiden Sudan dengan masa jabatan lima tahun (2001-2006). (Charles, 1989).

## **B. Dinamika Politik Darfur**

### **1. Sejarah Darfur**

Darfur merupakan salah satu daerah di Afrika yang terletak di Republik Sudan bagian Barat. Darfur sendiri memiliki arti “Tanah orang Fur” (dalam bahasa Arab). Bangsa Fur sendiri termasuk ke dalam golongan orang Afrika yang memiliki kulit hitam atau yang biasa disebut dengan Black African. Bangsa Fur ini termasuk salah satu bangsa yang masih terus mempertahankan tradisinya secara turun-menurun dan petani merupakan mayoritas pekerjaan dari mereka. Dalam kehidupan sehari-hari mereka pun masih berbicara menggunakan bahasa Fur yang mana merupakan bahasa suku asli mereka dan juga mereka umumnya menempati daerah di sekitar pegunungan Marra.

Pada zaman dahulu Darfur merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan berbentuk kerajaan. Darfur juga menjadi salah satu negara yang kuat dengan adanya etnis



Afrika dibawah kerajaan Kordofan pada masa kejayaannya di abad ke-17. Pada masa itu kerajaan Kordofan ini berkembang dengan pesat hingga wilayah Darfur mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat baik dan juga memiliki sumber daya alam yang melimpah dan dapat dikelola dengan baik. Ketika pada masa kejayaannya, kerajaan Kordofan ini mempekerjakan etnis Arab yang diberi mandat atau tugas untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah Darfur, hal ini lah yang akhirnya mejadikan Etnis Afrika dan juga Arab dapat hidup berdampingan.

Namun memasuki tahun 1875, kerajaan mengalami penurunan dikarenakan adanya perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Mesir. Hal tersebut dapat dilihat dari kedatangan orang kaya dari Mesir ke wilayah Darfur dengan tujuan ingin membeli dan mengelola sendiri lahan pertanian yang ada di Darfur. Hal ini lah yang mengakibatkan banyak masyarakat yang berasal dari etnis Arab yang mulai dipekerjakan disana. Atas kejadian tersebut akhirnya membuat Etnis Afrika begitu membenci Etnis Arab. (Samuel, 2006). Selain itu pada tahun 1821 Mesir berhasil merebut bagian timur kerajaan dan juga berhasil merebut bagian barat kerajaan pada saat berada di antara tahun 1874-1898. Namun satu tahun berselang, inggris melakukan invasi terhadap Mesir tepatnya pada tahun 1882. Akibat dari invasi yang dilakukan oleh Inggris terhadap Mesir, kekuasaan Mesir atas Darfur menjadi lemah. Selain itu, Inggris juga melakukan perluasan wilayah kekuasaannya yang ada di Sudan. (George, 1992).

Selama dunia sedang mengalami situasi yang sangat tidak kondusif terutama pada saat terjadi Perang Dunia I tepatnya pada tahun 1916, Inggris mulai melakukan langkah invasi terhadap Darfur yang pada akhirnya hal tersebut mengakibatkan Darfur mendapatkan serangan dari Mesir dan juga Sudan. Sejak adanya kekuasaan kolonial yang dilakukan oleh Inggris pada tahun 1916, Darfur semakin menjadi daerah yang terbelakang. Hal tersebut dikarenakan Inggris ingin menjadikan kawasan Khartoum sebagai pusat pemerintahan

yang mencakup ekonomi, politik dan juga perdagangan. Hal inilah yang pada akhirnya merugikan Darfur sebagai daerah yang terpencil. Selain itu Inggris juga melarang adanya kegiatan investasi ataupun pembangunan di Darfur. Bahkan pemusatan kekuasaan ini masih terus berlanjut sampai pada akhirnya Sudan memperoleh kemerdekaannya yaitu pada tahun 1956. (Samuel, 2006).

## **2. Kondisi Geografis Darfur**

Darfur atau yang dikenal dengan sebutan tanah orang Fur adalah salah satu wilayah yang tepatnya terletak di Sudan bagian Barat dimana Darfur ini berbatasan langsung dengan Afrika Tengah, Chad, dan juga Libya. Darfur merupakan negara yang memiliki luas wilayah hanya kurang lebih seperlima dari luas wilayah Sudan. Darfur sendiri berada di daerah pegunungan dan juga gurun pasir. Ada beberapa pembagian musim di Darfur diantaranya yang pertama adalah musim panas yaitu berada diantara bulan Juli hingga Oktober, selanjutnya yang kedua adalah musim dingin dimana berada diantara bulan November hingga Maret dan yang terakhir adalah musim hujan yang terjadi di antara bulan April hingga Juni. Suhu rata-rata pada siang hari di Darfur berada pada titik 40°-50° C sedangkan pada malam hari dan juga pagi hari memiliki suhu yang relatif sama yaitu antara 5°-15° C.

Berdasarkan kondisi geografisnya, Darfur memiliki empat tipikal wilayah. Yang pertama yaitu daerah Darfur di bagian timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dan juga perbukitan berpasir yang biasa disebut dengan nama *goz*. *Goz* adalah suatu tempat yang dapat di kategorikan ke dalam wilayah yang tandus. Di tempat ini susah ditemukan sumber air bahkan hampir tidak ada. Oleh karena itu, di tempat ini tidak dapat dihuni oleh siapapun kecuali jika terdapat sumber air seperti contohnya waduk. Selanjutnya karakter yang kedua adalah *wadi* yang mana ini merupakan sungai musiman. Sungai ini hanya akan memiliki aliran air disaat musim hujan saja bahkan terkadang akan

terjadi banjir bandang selama musim penghujan tiba. Yang ketiga yaitu berada di daerah Darfur bagian barat dimana sebagian besar wilayahnya berupa batuan dasar yang tertutup lapisan tanah berpasir yang tipis sehingga sangat cocok untuk beternak. Karakter yang ke empat merupakan kawasan yang lebih subur dibandingkan kawasan lainnya. Kawasan ini biasa disebut dengan nama *Pegunungan Marra* yang mana di kawasan ini terdapat curah hujan yang cukup tinggi dan juga memiliki banyak cadangan minyak. (Adnan, 2006).

### **3. Etnis dan Perekonomian Darfur**

Populasi penduduk yang ada di Darfur berada pada angka 6 juta jiwa. Darfur terdiri dari berbagai macam etnis. Ada sekitar 80 etnis yang berada di daerah ini. Akan tetapi, ada dua etnis yang mendominasi di Darfur yaitu sebanyak 27 di antaranya merupakan etnis Arab dan sisanya merupakan etnis Afrika. agama yang di anut oleh sebagian besar penduduk di Darfur adalah agama islam dan mereka menggunakan bahasa arab sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Sebagian besar penduduk yang tinggal di Darfur bermata pencaharian sebagai peternak sapi dan juga unta serta bermata pencaharian sebagai petani.

#### **a. Etnis di Darfur**

Seperti yang telah diketahui bahwasanya Darfur memiliki dua etnis yang mendominasi yaitu etnis Afrika dan juga Arab. Menurut sejarah, masuknya etnis Arab ke Darfur dan juga Sudan pada abad ke 13 karena adanya ketidakstabilan dalam bidang sosial politik di kawasan Timur Tengah. Atas kejadian tersebut, banyak etnis arab yang melarikan diri dari negaranya dan mengungsi ke negara lain bahkan ada juga yang menetap disana. Salah satu negara yang menjadi tujuan mereka adalah Darfur. Para pengungsi ini banyak tersebar di Darfur bagian tengah dan juga selatan.

Etnis Afrika Hitam atau yang biasa disebut dengan etnis non Arab memiliki berbagai macam suku. Ada tiga suku yang sangat dominan disana yaitu, suku Massalit, Fur dan juga Zaghawa. Selain itu, mereka juga masih mempertahankan bahasa daerah atau bahasa asli mereka sebagai bahasa sehari-hari. Tetapi sebagian dari mereka juga ada yang kehilangan bahasa daerah mereka sehingga mereka menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa sehari-hari. Namun sebagian lainnya juga ada yang menggunakan bahasa Arab dan juga tetap mempertahankan bahasa daerah mereka.

#### b. Perekonomian di Darfur

Darfur merupakan salah satu wilayah di Sudan yang memiliki sumber daya alam yang melimpah diantaranya seperti uranium, gas dan juga minyak. Hal tersebut yang akhirnya menjadikan negara barat berlomba-lomba untuk merebut kekayaan yang dimiliki oleh Darfur. Salah satu contohnya adalah Amerika Serikat dan juga Inggris. Terkait dengan pendapatan yang diperoleh Darfur dari kekayaan yang mereka miliki, Darfur juga memberikan Pemerintah Sudan sebanyak US\$ 4 miliar. Karena kekayaan yang dimilikinya itu, maka pemerintah Sudan juga memiliki hubungan yang cukup erat dengan pemerintah China. Bahkan impor minyak yang dilakukan oleh Sudan ke China sudah hampir mencapai 10%

Selain sumber daya minyak yang melimpah, Darfur juga memiliki cadangan emas hitam dimana hal tersebutlah yang menjadikan negara lain sangat ingin sekali menguasai Darfur. Diketahui sering kali banyak pesawat asing yang tertangkap basah keluar dari Sudan dan membawa hasil curian mereka berupa minyak mentah yang mereka dapatkan dari daerah yang sedang konflik. Namun hal tersebut berhasil di gagalkan oleh tim keamanan Sudan. Darfur juga memiliki cadangan minyak bumi sebesar kurang lebih 631 juta barel dan juga gas alam sekitar 99 miliar meter kubik. Selain dua sumber daya itu, Sudan juga memiliki cadangan sumber daya lain berupa tembaga dan biji besi. Kini dalam per hari, Sudan dapat

memproduksi minyak mentah sebanyak 500 ribu barel. Dikarenakan kekayaan alam yang sangat melimpah yang dimiliki Darfur ini yang akhirnya menjadikan sumber masalah hingga terjadi konflik yang berkepanjangan. Selain itu konflik internal yang menimpa Darfur juga yang akhirnya membuat banyak LSM asing datang ke Darfur dengan tujuan ingin memperebutkan kekayaan sumber daya alam tersebut.

#### 4. Wilayah di Darfur

Pada masa pemerintahan Sadiq Al Mahdi tepatnya pada tahun 1986, pemerintah Sudan mengusulkan untuk diadakannya pemecahan Darfur menjadi tiga wilayah. Tetapi pada kenyataannya ketika pada masa pemerintahan presiden Omar Hassan Al Bashir (tahun 1994) kebijakan ini baru dapat terealisasi. Darfur dipecah menjadi tiga wilayah yakni Darfur Barat (*Gharb Darfur*) yang memiliki ibukota Geneina, Darfur Utara (*Syamal Darfur*) yang memiliki ibukota Al Fasher, dan yang terakhir adalah Darfur Selatan (*Janub Darfur*) yang memiliki ibukota Nyala.

**Gambar 3. Peta Wilayah Darfur.**



(Sumber: J. Flint and Alex de Waal in *Darfur: a new history of a long war bobok*)

a. Darfur Barat (*Gharb Darfur*)

Luas wilayah yang dimiliki oleh Darfur Barat adalah sekitar 76 ribu km<sup>2</sup> yang memiliki ibukota bernama Geneina. Etnis yang berdomisili di wilayah ini adalah etnis Afrika Hitam dan juga Afrika Arab. Mayoritas etnis yang ada di Darfur Barat ini adalah etnis Afrika Hitam. Kelompok yang berasal dari suku Massalit yang mendominasi di Darfur Barat. Ada sekitar 60% suku Massalit yang mendiami kawasan tersebut. Kemudian ada juga etnis Afrika Hitam lainnya yang mendiami kawasan ini seperti Zaghawa, Erennga, Gimr dan juga Fur. Sedangkan kelompok yang berasal dari etnis Afrika Arab menjadi kaum minoritas di kawasan ini karena hanya ada sekitar 5% orang yang berdomisili di kawasan ini.

Darfur Barat merupakan salah satu daerah yang terkenal subur di Sudan. Oleh karena itu, pertanian di Darfur Barat ini juga sangat subur. Selain tanahnya yang subur, sumber air di daerah ini juga cukup melimpah. Tingginya curah hujan lah yang mempengaruhi tercukupinya sumber air di wilayah ini. Mata pencaharian yang dominan di wilayah ini adalah sebagai petani karena tanah yang mereka tinggali sangat subur. Ketika musim penghujan tiba masyarakat di Darfur Barat selalu mengumpulkan air hujan tersebut ke dalam sebuah waduk yang mana ketika musim kemarau tiba dan terjadi kelangkaan air, mereka dapat memanfaatkan waduk tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. (Adnan, 2006).

b. Darfur Utara (*Syamal Darfur*)

Luas wilayah yang dimiliki oleh Darfur Utara ini adalah sekitar 296 ribu km<sup>2</sup> dan memiliki ibu kota bernama Fasher. Wilayah Darfur Utara ini dihuni oleh dua etnis mayoritas yaitu Afrika dan Zaghawa. Sebagian besar mata pencaharian mereka adalah sebagai penggembala unta. Wilayah Darfur Utara ini memiliki kondisi geografis yang sangat berbanding terbalik dengan Darfur Barat dikarenakan di

wilayah ini hampir di dominasi oleh hamparan gurun pasir yang sangat luas sehingga akses untuk menuju ke wilayah ini juga terbilang sangat sulit. Selain itu curah hujan di wilayah ini juga sangat rendah yang akhirnya menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan.

c. Darfur Selatan (*Janub Darfur*)

Luas wilayah yang dimiliki oleh Darfur Selatan ini adalah sekitar 127 ribu km<sup>2</sup> dan memiliki ibu kota bernama Nyala. Sekitar 60% penduduk Darfur Selatan ini ber etnis Afrika dan memiliki bermacam-macam suku diantaranya seperti : suku Nuba, Nilotik, Dinka, Nuer, Nilo Hamitik, Zande, dan juga Shiluka. Kondisi geografis di wilayah ini hampir sama dengan Darfur Barat karena memiliki curah hujan yang tinggi dan juga tanah yang subur. Sehingga mata pencaharian penduduknya pun adalah sebagai petani. Pertanian yang ada di wilayah ini merupakan hasil bumi terbesar yang dapat dihasilkan. Selain dari pertanian, adanya tambang minyak di wilayah ini juga membuat Darfur Selatan sangat strategis dan juga potensial dalam menyokong perekonomian Sudan.

## **C. Konflik Darfur**

### **1. Sebab dari Konflik Darfur**

Pada tahun 1956 yang mana itu merupakan tahun dimana Sudan memperoleh kemerdekaannya. Sejak saat itu konflik di Sudan khususnya Darfur sudah sering kali terjadi. Konflik ini bermula pada pertengahan tahun 1930-an, dimana pada saat itu terjadi bencana kekeringan berkepanjangan yang melanda hampir sebagian besar wilayah Sudan termasuk juga Darfur sehingga menyebabkan munculnya ketidakstabilan di wilayah Darfur. Selain itu, muncul konflik baru lagi yaitu berupa adanya persengketaan lahan yang terjadi antara etnis Afrika Hitam dengan Arab Afrika. Konflik ini bermula pada saat hewan ternak yang dimiliki oleh etnis Arab Afrika sering

masuk dan merusak ladang milik petani Afrika Hitam, namun konflik persengketaan ini masih dapat diselesaikan dengan negosiasi damai antara kedua belah pihak yang terlibat konflik. Namun seiring berjalannya waktu, konflik-konflik tersebut mulai berubah menjadi konflik yang berbau politik. Konflik ini terjadi karena seringnya terjadi kekeringan berkepanjangan di Sudan khususnya wilayah Darfur, adanya persaingan dalam memperebutkan kekayaan sumber daya alam dan juga tanah yang dimiliki oleh salah satu wilayah, buruknya birokrasi pemerintahan dan juga adanya kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh senjata.

Memasuki pertengahan tahun 1987 terjadilah perang antar suku. Dimana suku yang terlibat adalah suku Fur dengan suku Arab. Pada saat itu tentara Sudan mempersenjatai suku Arab dan juga memberikan kuda layaknya seperti para ksatria yang dikenal dengan sebutan *Janjaweed*. Selain itu adanya marjinalisasi di Darfur yang dilakukan oleh pemerintah pusat di Khartoum dengan beberapa daerah menyebabkan munculnya kelompok-kelompok pemberontak yang biasa dikenal dengan sebutan *Darfur Liberation Front*.

Kelompok pemberontak ini (*Darfur Liberation Front*) yang nantinya akan menjadi titik awal munculnya pemberontak yang ada di wilayah Darfur sekitar tahun 1980-an. Kelompok pemberontak ini juga telah mendapatkan pelatihan dari etnis Zaghawa. Sementara itu, sebelumnya mereka juga telah dilatih dan dipersenjatai secara militer oleh tentara Sudan dan juga Chad. Pada sekitar tahun 2002 terdapat tiga suku yaitu Fur, Zaghawa dan juga Masalit mengambil sebuah keputusan untuk bergabung dengan *Darfur Liberation Front*. Selain *Darfur Liberation Front* ada juga kelompok pemberontak lain yang bernama *Justice and Equality Movement* (JEM). Keduanya mempunyai kecenderungan untuk bergerak dalam bidang politik yang memuat bermacam-macam isu diskriminatif dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat Darfur khususnya Afrika Hitam Darfur.



Kedua kelompok tersebut pada akhirnya melakukan penyerangan ke markas milik pemerintah yang berada di Golo, Jabal Marra pada tanggal 26 Februari 2003. Oleh karena adanya penyerangan tersebut yang akhirnya menjadikan cikal bakal terjadinya perang antara Pemerintah Sudan sendiri yang telah didukung penuh oleh milisi dari Arab (*Janjaweed*) dengan kelompok pemberontak Darfur. Kedua kelompok pemberontak tersebut melakukan sebuah penyerangan terhadap pos-pos militer milik pemerintah Sudan yang ada di Jabal Marra.

Satu bulan berselang setelah pemberontakan pertama yaitu pada 25 Maret 2003 gabungan dari kedua kelompok pemberontak tersebut berhasil merebut markas militer milik pemerintah Sudan yang berada di kota Tine tepatnya berada di daerah perbatasan Sudan dengan Chad. Kemudian setelah keberhasilannya itu, *Darfur Liberation Front* memutuskan untuk mengganti namanya menjadi *Sudan Liberation Movement/Army* (SLM/A). Banyak sekali tuntutan-tuntutan bernuansa politik yang dilayangkan oleh kelompok ini diantaranya : mereka menuntut agar sosial dan ekonomi Darfur lebih dikembangkan, mereka menginginkan adanya pembubaran terhadap milisi etnis, mereka ingin pemerintah pusat melakukan pembagian kekuasaan, mereka menginginkan adanya pemerataan pembangunan, dan yang terakhir adalah keinginan dari mereka untuk mendapatkan kesejahteraan moral serta material bagi seluruh masyarakat Sudan.

Satu bulan berikutnya tepatnya pada April 2003 kelompok ini kembali melakukan penyerangan, namun penyerangan kali ini mengarah ke bandar udara El Fasher yang merupakan ibukota dari Darfur Utara. Akibat dari penyerangan ini, banyak pesawat tempur dan juga helikopter milik pemerintah yang mengalami kerusakan cukup parah. Selain itu banyaknya aksi pencurian bahan bakar dan juga penjarahan-penjarahan terhadap gudang senjata milik pemerintah. Sementara itu aksi lain yang juga dilakukan oleh *Sudan Liberation Movement/Army* (SLM/A) adalah

melakukan penyerangan terhadap kota Mellit yang merupakan kota terbesar kedua di Darfur Utara. Tidak berhenti disitu saja, konflik tersebut semakin meluas tepatnya pada Juli 2003 dimana pemerintah Sudan melakukan penyerangan balik terhadap *Sudan Liberation Movement/Army* (SLM/A) melalui cara pengeboman yang dilakukan oleh pesawat tempur milik pemerintah Sudan serta melakukan serangan melalui jalur darat yang dilakukan oleh militer Sudan.

## **2. Pihak yang Terlibat dalam Konflik Darfur**

Konflik yang sedang terjadi di Darfur ini bermula dari adanya perebutan lahan ternak dan juga sumber air yang ada di Darfur. Kemudian permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks dan berubah menjadi konflik bernuansa etnis. Dalam hal ini pemerintah Darfur sendiri juga lebih mengutamakan masyarakat yang berasal dari etnis Afrika Arab. Sehingga hal tersebut menyebabkan munculnya kecemburuan sosial serta ketidakpuasan dari masyarakat etnis Afrika Hitam terhadap pemerintah. (Adnan, 2006). Dikarenakan adanya hal tersebut yang akhirnya memunculkan dua gerakan politik yaitu yang pertama adalah Gerakan Keadilan dan Kesetaraan atau yang biasa disebut dengan *Justice and Equality Movement* (JEM) yang berada dibawah pimpinan Abdul Wahid Mohammed al-Nur dan yang kedua adalah Gerakan Pembebasan Sudan atau yang biasa disebut dengan *Sudan Liberation Movement/ Army* (SLM/A) yang berada dibawah pimpinan Shadiq AL-Mahdi. Kedua kelompok ini beranggotakan para petani dari etnis Afrika non Arab yang sebagian besar beragama islam. Pada tahun 2003 mereka mulai melakukan pemberontakan-pemberontakan terhadap pemerintah Sudan yang mereka anggap telah melakukan aksi diskriminasi terhadap kelompok Afrika non Arab (Afrika Hitam)

Selain kelompok tersebut, ada juga pihak lain yang terlibat dalam konflik ini yaitu pemerintahan Sudan itu sendiri dan juga kelompok militer yang berasal dari etnis Arab yang

diberi dukungan penuh oleh pemerintah Sudan (*Janjaweed*). Dukungan yang diberikan oleh pemerintah Sudan terhadap *Janjaweed* adalah berupa persenjataan, finansial dan juga bantuan lainnya. Oleh karena adanya dukungan dari pemerintah Sudan tersebut menjadikan *Janjaweed* lebih unggul dibandingkan SLM/A dan JEM.

### **3. Dampak Konflik Darfur**

Dampak yang ditimbulkan dari konflik Darfur ini sangatlah beraneka ragam diantaranya adalah banyaknya kasus kelaparan, kemiskinan, instabilitas politik, pengungsian dan juga ancaman keamanan internasional yang mengancam stabilitas regional Darfur itu sendiri. Berdasarkan data yang dimiliki oleh PBB tercatat kurang lebih 350 ribu orang meninggal dunia sejak konflik tersebut terjadi di Darfur pada tahun 2003. Namun data yang diberikan oleh PBB tersebut ditolak dengan tegas oleh pemerintah Sudan karena korban yang dinyatakan meninggal dunia hanya sebanyak kurang lebih 10 ribu jiwa.

Tidak hanya itu saja dampak yang terjadi akibat konflik tersebut yakni banyaknya masyarakat sipil maupun para militer yang kehilangan rumah dan anggota keluarganya akibat adanya beberapa aksi seperti penghancuran, penjarahan, perampokan, pemerkosaan, penculikan bahkan aksi pembunuhan terhadap warga sipil. Berdasarkan data milik PBB dinyatakan bahwa korban yang berjatuh akibat dari konflik ini berkisar antara 250 ribu hingga 550 ribu jiwa. Diantaranya ada sekitar kurang lebih dua hingga lima ribu pemberontak yang tertangkap, terluka bahkan terbunuh, lalu ada sekitar lima belas hingga dua puluh ribu prajurit, 51 orang tim yang tergabung dalam misi perdamaian dan juga 300 ribu warga sipil yang terbunuh. Selain itu ada sekitar kurang lebih 1,5 hingga 2 juta orang kehilangan rumahnya dikarenakan adanya aksi penghancuran yang dilakukan oleh *Janjaweed* (milisi Arab). Akibat dari aksi tersebut, para korban banyak yang

mengungsi ke Libya ataupun Chad yang mana mereka adalah negara tetangga yang paling dekat lokasinya dari Sudan.

Selain itu masih ada kerugian yang harus ditanggung oleh Sudan akibat dari konflik ini yaitu berupa kerugian dimana pada tahun 2007 pemerintah Sudan harus mengirimkan pasukan PBB dan juga Uni Afrika ke daerah yang sedang mengalami konflik yang mana itu memakan dana sebesar 2 miliar US\$. Selain itu para perempuan di Darfur juga harus mengalami tindakan kekerasan seksual dari milisi *Janjaweed*. Pengungsi-pengungsi ini juga banyak yang mengalami gangguan stres pasca trauma (PTSD) dan juga tekanan.